

Dampak Positif Etnosentrisme Batak Angkola Sipirok Dalam Gerakan Marsipature Hutana Be (1988-1990)

Rosnaubah Harahap¹, Pujiati²

^{1,2}Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: rosnaubah1129@gmail.com¹, pujiati@usu.ac.id²

ABSTRAK

Etnosentrisme merupakan sikap yang rentan terjadi di Indonesia, berbagai etnis yang berbeda menjadi salah satu pemicunya. Dalam sejarah Indonesia, penduduk telah merasakan dampak negatif dari etnosentrisme para penjajah baik itu dari kolonial Belanda maupun Jepang. Setelah kemerdekaan, sikap etnosentrisme lagi-lagi menjadi masalah, dimana terdapat beberapa pemberontakan pasca kemerdekaan hingga konflik antar dua etnis berbeda. Namun, etnosentrisme tidak hanya menimbulkan dampak negatif. Di sisi lain, sikap ini dapat menimbulkan dampak positif seperti yang terjadi pada Gerakan Marsipature Hutanabe di Sumatra Utara tahun 1988. Gerakan tersebut tidak lepas dari etnosentrisme Batak Angkola Sipirok dalam mengusung pembangunan desa di Sumatra Utara. Yang mana memiliki dampak positif diantaranya mendorong dan menguatkan masyarakat yang memiliki latar belakang sejarah yang sama, meningkatkan semangat dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta mengembangkan perilaku semangat patriotisme dalam pembangunan desa yang tidak hanya berdampak pada kelompok etnis Batak Angkola Sipirok tetapi pada etnis-ethnis lainnya di Sumatra Utara. Memaparkan dampak positif dari etnosentrisme Batak Angkola Sipirok dalam Gerakan marsipature Hutanabe 1988-1990

Penelitian ini menggunakan metode penulisa sejarah yang memiliki empat langkah, yaitu: (1) Heuristik; (2) Kritik; (3) Interpretasi; dan (4) Historiografi. Dengan pendekatan yang dilakukan melalui teori ilmu sosial sebagai interpretasi dalam penulisan sejarah etnosentrisme Batak Angkola Sipirok dalam gerakan Marsipature Hutanabe 1988-1990.

Etnosentrisme Batak Angkola Sipirok dalam Gerakan Marsipature Hutanabe pada tahun 1988 mulanya dianggap sebagai sikap primordialisme Guberbur Raja Inal Siregar yang tidak mampu meninggalkan kesukuannya, namun usulan gerakan pembangunan desa yang diadaptasi dari semboyan kuno suku Batak Angkola mendapat perhatian dan respon positif oleh kelompok etnis Batak Angkola di Sipirok, demikian timbulah sikap etnosentrisme yang etnis Batak Angkola baik yang di Sipirok dan diluar daerah mulai mengagungkan gerakan pembangunan desa yang dikaitkan dengan semboyan nenek moyak mereka. Perlahan, gerakan tersebut mulai meraih perhatian dari para perantau di luar daerah untuk kembali membangun kampung halaman masing-masing. Dari sikap etnosentrisme tersebut dituai dampak positif, dimana mendorong para perantau dan menguatkan masyarakat yang memiliki latar belakang sejarah yang sama, meningkatkan semangat dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta mengembangkan perilaku semangat patriotisme dalam pembangunan desa yang tidak hanya berdampak pada kelompok etnis Batak Angkola Sipirok tetapi pada etnis-ethnis lainnya di Sumatra Utara untuk mengerahkan para perantau untuk kembali membangun kampung halaman masing-masing. Terdapat banyak isu yang berkaitan dengan kajian etnosentrisme, begitu juga dengan Gerakan Marsipature Hutanabe. Tetapi dalam penelitian ini dikhawasukan lebih kepada dampak positif etnosentrisme.

Kata Kunci: Etnosentrisme, Batak Angkola, Sipirok, Marsipature Hutana Be

The Positive Impact of Batak Angkola Sipirok Ethnocentrism in the Marsipature Hutana Be Movement (1988-1990)

ABSTRACT

Ethnocentrism is an attitude that is prone to occur in Indonesia, various different ethnicities are one of the triggers. In Indonesian history, the population has felt the negative impact of the ethnocentrism of the colonizers, both from the Dutch and Japanese colonialists. After independence, ethnocentrism again became a problem, where there were several post-independence rebellions to conflicts between two different ethnicities. However, ethnocentrism does not only have negative impacts. On the other hand, this attitude can have positive impacts such as what happened in the Marsipature Hutana Be Movement in North Sumatra in 1988. The movement was inseparable from the ethnocentrism of the Batak Angkola Sipirok in carrying out village development in North Sumatra. Which has positive impacts including encouraging and strengthening communities that have the same historical background, increasing enthusiasm and strengthening unity and unity and developing patriotic behavior in village development which not only has an impact on the Batak Angkola Sipirok ethnic group but also on other ethnicities in North Sumatra. Explaining the positive impact of the ethnocentrism of the Batak Angkola Sipirok in the Marsipature Hutana Be Movement 1988-1990

This research uses a historical writing method that has four steps, namely: (1) Heuristics; (2) Criticism; (3) Interpretation; and (4) Historiography. With the approach taken through social science theory as an interpretation in writing the history of the ethnocentrism of the Batak Angkola Sipirok in the Marsipature Hutana Be movement 1988-1990. The ethnocentrism of the Batak Angkola Sipirok in the Marsipature Hutana Be Movement in 1988 was initially considered as a primordial attitude of Governor Raja Inal Siregar who was unable to leave his tribe, but the proposal for a village development movement adapted from the ancient motto of the Batak Angkola tribe received attention and a positive response from the Batak Angkola ethnic group in Sipirok, thus an ethnocentric attitude arose in which the Batak Angkola ethnic group both in Sipirok and outside the region began to glorify the village development movement associated with the motto of their ancestors. Slowly, the movement began to gain attention from migrants outside the region to return to build their respective hometowns. From this ethnocentric attitude, positive impacts were reaped, which encouraged migrants and strengthened communities that had the same historical background, increased enthusiasm and strengthened unity and togetherness and developed a spirit of patriotism in village development that not only had an impact on the Batak Angkola Sipirok ethnic group but on other ethnic groups in North Sumatra to mobilize migrants to return to build their respective hometowns. There are many issues related to the study of ethnocentrism, as well as the Marsipature Hutana Be Movement. But in this study, it is more focused on the positive impacts of ethnocentrism.

Keywords: Ethnocentrism, Batak Angkola, Sipirok, Marsipature Hutana Be

PENDAHULUAN

Etnosentrisme merupakan sikap yang rentan terjadi dalam suatu negara yang memiliki banyak etnis berbeda, dan hal tersebut telah terjadi di Indonesia. Prilaku etnosentrisme tidak hanya dialami oleh penduduk Indonesia di zaman modern ini tetapi telah berlangsung sejak masa penjajahan. Pada masa kolonial Belanda, penduduk Indonesia atau yang masih di sebut Nusantara amat sangat direndahkan oleh kolonialisme yang merajalela, bahkan kolonial membuat sebutan penduduk asli sebagai pribumi. Sikap merendahkan suatu etnis dengan menganggap ras nya yang lebih unggul merupakan sikap kasar yang dapat merusak tatanan masyarakat. Setelah kolonialisme, Indonesia juga memiliki kasus ekstrik dari etnosentrisme, yaitu konflik

sampit pada tahun 2001 yang melibatkan etnis Dayak dan Madura. Konflik-konflik tersebut merupakan dampak negatif dari sikap etnosentrisme, namun dalam sejarah Indonesia juga terdapat begitu banyak kasus- kasus etnosentrisme yang membawa dampak positif, salah satunya terjadi pada gerakan pembangunan desa yang dirintis oleh Gubernur Raja Inal Siregar di Provinsi Sumatra Utara pada tahun 1988 yaitu Gerakan Marsipature Hutanabe yang diangkat dari semboyan etnis Batak Angkola di Sipirok.

Langkah yang dilakukan Gubernur Raja Inal dalam membuat sebuah gerakan dengan mengangkat etnisnya merupakan hal yang tabu di Provinsi Sumatra Utara sebab masyarakat tidaklah homogen atau terdiri dari satu etnis tetapi heterogen, bahkan wilayah tersebut merupakan salah satu diantara wilayah di Indonesia yang memiliki etnis beragam, mulai dari Melayu, Padang, Batak, Jawa, Sunda, Cina, India dan lain-lainnya. Pada penelitian ini setidaknya penulis ingin membahas dampak positif etnosentrisme di Indonesia dengan studi kasus pada sikap etnosentrisme etnis Batak Angkola dalam gerakan pembangunan desa Marsipature Hutanabe tahun 1988-1989.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yaitu prosedur yang hipotesis harus dilakukan oleh sejarawan dalam penelitian dan penyusunan sejarah. Terdapat langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah, diantaranya: (1) Heuristik, sebagai proses mencari atau menelusuri bukti atau bahan berupa sumber sejarah baik itu sumber primer atau sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menemukan sumber primer tertulis "Marsipature Hutanabe" yang diterbitkan oleh Analisa Harian di Medan tahun 1990 yang memuat peranan etnis Batak Angkola dalam membangun Gerakan Marsipature Hutanabe tahun 1998. Selain itu, penulis menemukan sumber sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian. (2) Kritik, yang dikenal dalam dua langkah, pertama kritik ekstren sebagai langkah verifikasi dalam bidang keaslian dari sebuah sumber, kedua kritik intern sebagai langkah verifikasi dalam bidang kredibilitas sebuah sumber. (3) Interpretasi, atau penafsiran sejarah yang dilakukan dengan menguraikan data-data dalam sumber yang selanjutnya akan disatukan sebagai sebuah tulisan sejarah sebagai hasil penelitian. (4) Historiografi, mengutip dari Louis Gottschalk historiografi merupakan sebuah langkah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lalu dengan menjadikan data-data yang diperoleh sebagai dasar, yang didalam prosesnya terdapat unsur sejarah yang menjadi pokok dasar sejarah, berupa bentuk tulisan sintesis yang menjelaskan aspek kronologi sejarah tersebut. Melalui keempat langkah metode penelitian sejarah, penulis melakukan penelitian ini yang didampingi oleh pendekatan ilmu sosial sebagai ilmu bantu dalam menuliskan sejarah kebudayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etnosentrisme merupakan sikap atau kepercayaan terhadap kebudayaan milik sendiri lebih baik dan lebih tinggi nilainya dibandingkan kebudayaan kebudayaan lainnya. Dengan kata lain, etnosentrisme merupakan sikap suatu kelompok yang memandang kebudayaan diluar miliknya berdasarkan dasar atau standard kebudayaannya sendiri, sehingga muncul perspektif dimana kebudayaan lain disekitarnya memiliki nilai yang lebih rendah⁵. Sikap tersebut juga menggambarkan ketidaksanggupan suatu kelompok kebudayaan melihat atau menghargai pandangan kelompok dari kebudayaan atau masyarakat lain.

Secara individu, seseorang yang memiliki sikap etnosentrisme ini beranggapan bahwa dirinya sendiri merupakan manusia sedangkan yang lain bukan termasuk manusia. Terdapat beberapa individu yang melabeli individu lainnya dengan sebutan tidak pantas dan lebih rendah dari manusia. Sehingga individu tersebut dianggap tidak memiliki prikemanusiaan atau tatasusila. Etnosentrisme dapat dianggap sebagai penilaian dan penghakiman yang berdasarkan atas keutamaan yang tidak rasional dan tidak mampu dibuktikan sah atau tidak dengan cara rasional, maka dapat disebutkan bahwa unsur-unsur etnosentrisme bisa dikatakan ada dalam semua masyarakat dan kebudayaan. Adapun bentuk etnosentrisme yang buruk diantaranya ialah rasisme dan nasionalisme yang ekstrem dari teori sosial modern. Selain itu, etnosentrisme tidak hanya sebatas memberi keuntungan terhadap kebudayaan sendiri, tetapi juga berarti perasaan mengagung-agungkan kebudayaan sendiri bersamaan dengan memiliki perasaan merendahkan kebudayaan yang lainnya

Akibat etnosentrisme sering kali anggota masyarakat plural gagal dalam mengerti akan tujuan dan gerak-gerik anggota masyarakat lainnya. Kasus yang paling sering terjadi adalah ketika timbul kesalahpahaman terhadap nilai-nilai suci yang dapat menimbulkan kemarahan, atau reaksi yang menguatkan ide stereotipe terhadap kalangan lain.

Sisi negatif dari etnosentrisme dapat menimbulkan konflik antara dua golongan kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda, seperti dalam masa revolusi permusuhan kelas menjadi konflik yang amat sering menjadi perhatian. Dampak negatif paling sederhana ialah kegagalan seseorang beradaptasi dalam suatu kelompok kebudayaan yang tergolong etnosentrisme, contohnya ialah ketika seseorang dari etnis berbeda datang dan bermukin di wilayah yang memiliki mayoritas etnis yang sama. Di Indonesia terdapat beberapa contoh sikap etnosentrisme ekstrim yaitu konflik sampit antara masyarakat etnis Dayak dsn Madura pada tahun 2001, konflik tersebut merupakan sikap etnosentrisme yang menyita begitu banyak perhatian dari warga negara Indonesia terkhususnya pemerintahan yang terjun langsung untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Namun tidak menutup kemungkinan untuk sikap etnosentrisme memiliki dampak positif. Sebab interaksi kooperatif sekelompok etnis tertentu dalam mencapai tujuan tradisional, mereka dapat menggunakan cara yang disetujui, dimotivasi oleh perasaan persuasif bahwa cara hidup mereka adalah yang paling masuk akal, layak,

nyaman, dan cara yang pantas untuk menjalani kehidupan. Demikian jika tujuan suatu kelompok etnis berada dalam batas yang menghargai kepercayaan lain hingga mampu diterima oleh etnis lain maka timbulah ketenangan dalam kehidupan sosial. Untuk melakukan hal tersebut, suatu etnis tidak hanya harus memiliki kepercayaan diri terhadap etnis lainnya tetapi harus mampu mencapai kesepakatan dalam memupuk kesimpulan dengan etnis lainnya.

Adapun tujuannya harus berada dalam cakupan jangka pencampaian yang memiliki potensi keberhasilan besar, jika tidak maka tidak perduli baik itu individu ataupun kelompok tertentu tidak dapat mewujudkan asumsinya walau memiliki kepercayaan diri yang besar.

Sisi positif atau dampak positif dari etnosentrisme itu sendiri dapat memperkuat unsur-unsur budaya suatu masyarakat dengan memberi perhatian serta penekanan kepada perbedaan kebudayaan. Etnosentrisme juga dapat memupuk satu kesatuan antara anggota masyarakat, serta dapat menstabilkan disiplin dan semangat perjuangan suatu kelompok tertentu. Dampak positif tersebut merupakan kasus yang jarang diungkit terutama di Indonesia, padahal jika dikaji dari sejarahnya Indonesia merupakan negara dengan bangsa beragam dengan pengalaman atau rasa sejarah yang sama yaitu pada masa penjajahan. Sejarah yang dirasakan setiap bangsa di Indonesia tentu menjadi salah satu pendorong untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan dengan salah satu tujuannya ingin membebaskan kelompok etnisnya dari serangan dan perbudakan pada masa itu adalah termasuk dalam sikap etnosentrisme yang positif.

Etnis Batak Angkola Sipirok

Sipirok merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatra Utara yang memiliki etnis atau suku yang telah berkembang sejak masa lampau, seperti halnya dengan etnis Melayu di Wilayah Deli. Sipirok merupakan wilayah yang menghubungkan rute pasokan rembah-rempah dengan Padang Lawas pada masa Sriwijaya. Etnis yang mendominasi di Sipirok adalah Batak Angkola dimana wilayah tersebut telah menjadi tanah leluhur mereka.

Etnis Batak Angkola merupakan bagian dari etnis Batak yang mempunyai simbol sekaligus identitas yang disebut sebagai 'marga'. Etnis Batak Angkola memiliki marga yang kebanyakan dipakai secara turun temurun oleh masyarakatnya, adapun marga terbanyak ialah marga Lubis dan Nasution.

Dalam ajaran nenek moyang masyarakat Sipirok terdapat sebuah pepatah yang berbunyi: "*Manjappal tu balian, mangalngei tu bagasan.*" Pepatah ini diangkat dari kebiasaan kerbau mencari makanan, dimana para kerbau biasanya keluar dari kandang untuk mengambil rumput ke padang rumput (*menjappal*). Kemudian setelah dirasa sudah cukup, kerbau tersebut akan pulang ke kandangnya dan mulai menguyah kembali rumput yang didapatkan sebelumnya dengan santai (memamah biak).

Gambaran kebisaan kerbau tersebut dijadikan para leluhur Batak Angkola Mandailing khususnya daerah Sipirok sebagai petuah yang diberikan kepada anak cucu mereka. petuah tersebut berbunyi “pergilah mencari nafkah kemana pun. Tetapi jika telah mendapatkannya, bawalah pulang dan pergunakan bersama dengan sanak keluarga”.

Dampak Positif Etnosentrisme dalam Gerakan Marsipature Hutana Be

Secara epistemologi pengertian kalimat “Marsipature Hutana Be” adalah sebuah ajakan untuk memperbaiki (membangun) desa masing-masing. Ajakan tersebut merupakan bagian dari ajaran kuno yang diadaptasi dari ajaran nenek moyang masyarakat etnis Batak Angkola Sipirok. Gerakan Marsipature Hutana Be memiliki beberapa landasan yang diturunkan oleh para leluhur Sipirok terdahulu sebagai pedoman dalam menggerakkan pembangunan desa.

Terdapat tiga pepatah yang dipopulerkan oleh gerakan ini, diantaranya “*Ingat pautmu jalak!*”, “*Songon partubu ni buluh hait madungdung*”, dan “*Haru si dua gugut pedainang, dainang dainang kian*”. Pepatah tersebut ditujukan kepada masyarakat etnis Batak Angkola yang sedang dalam perantauan. Pepatah pertama “*Ingat pautmu jalak!*” berupa nasehat dalam bahasa Batak Angkola Sipirok yang memiliki arti “Ingat tambatan kakimu hai ayam jago”. Maksud dari pepatah ini adalah sebuah perumpamaan ayam jago sebagai perantau yang keluar dari desa, harus kembali ke kampung halamannya seperti ayam jago yang bebas berkakak menunjukkan kegagahannya, namun tidak diperbolehkan melupakan “*paut-nya*” tambatan kaki. Pesan yang terkandung ini adalah meskipun para perantau telah sukses di tanah perantauan tetapi hendaklah mengingat kampung halaman yang merupakan tambatan hati serta jadi diri yang sesungguhnya.

Nasehat kedua “*Songon partubu ni buluh hait madungdung*” adalah perumpamaan buluh bambu yang jika telah tumbuh tinggi ujung tanduknya akan kembali merundung ke bawah, ke tempat rumputnya mulai tumbuh. Hal ini dijadikan amanah oleh leluhur Sipirok kepada para perantau. Dimana para perantau diperbolehkan mencari kehidupan atau nafkah di kota lain sebanyak-banyaknya serta menuntut ilmu setinggi-tingginya, namun setelah mencapai semua yang diimpikan hendaklah mengingat kepada tempat asal, tempat dilahirkan yaitu kampung halaman sendiri. Sedangkan nasehat ketiga “*Haru si dua gugut pedainang, dainang dainang kian*” adalah nasehat untuk mencegah para perantau durhaka dan lupa kepada orang tuanya seperti yang dikisahkan dalam legenda Sampuraga dan Malinkundang yang malu mengakui ibu kandungnya setelah sukses kaya raya di tanah perantauan. Dalam pepatah tersebut leluhur Sipirok menyampaikan bahwa “meskipun ibu kita adalah *si dua gugut* yakni tikus, namun tetap saja beliau adalah ibu kandung kita”.

Ketiga nasehat diatas merupakan landasan gerakan ini diciptakan, dalam artian lebih luas gerakan ini diciptakan untuk mengingatkan para perantau di tanah perantauan bahwa perkataan leluhur bukanlah sekedar catatan sejarah atau pepatah dari masa lalu, tetapi semata-mata adalah sikap yang harus diemban sebelum

berangkat merantau. Sikap tersebut ialah meskipun kita telah sukses baik itu dalam hal harta dan ilmu, jangan sekali-kali melupakan orang tua dan kampung halaman tempat kita dibesarkan. Dengan demikian Gerakan Marsipature Hutana Be memiliki defenisi sebagai sebuah gerakan yang menyerukan tanggung jawab untuk membangun desa masing-masing khususnya diperuntukkan bagi perantau yang jauh dari kampung halamannya.

Etnosentrisme Batak Angkola Sipirok dalam Gerakan Marsipature Hutanabe pada tahun 1988 mulanya dianggap sebagai sikap primordialisme Guberbur Raja Inal Siregar yang tidak mampu meninggalkan kesukuannya. Kritik dugaan primornialisme tidak satu-satunya menjadi rintangan, tetapi banyak kritis yang meramalkan gerakan pembangunan desa yang mengangkat isu suatu etnik tersendiri tidak akan berhasil di wilayah Provinsi Sumatra Utara yang memiliki masyarakat heterogen. Gerakan mengajak perantau kembali ke kampung halaman yang merupakan dasar utama dalam gerakan tersebut juga dikritik karena telah diterapkan di Sumatra Barat sebelumnya, hal tersebut dikaitkan dengan masyarakat di Provinsi Sumatra Barat yang cenderung memiliki masyarakat homogen. Demikian Marsipature Hutanabe disebut tidak cocok dijadikan nama gerakan pembangunan desa di wilayah dengan masyarakat heterogen seperti di Sumatra Utara.

Namun meski mendapat banyak penentangan usulan gerakan pembangunan desa yang diadaptasi dari semboyan kuno suku Batak Angkola justru mendapat perhatian dan respon positif oleh kelompok etnis Batak Angkola di Sipirok, pengangkatan semboyan nenek moyang mereka sebagai landasan dari gerakan tersebut seolah-olah menjadikan gerakan tersebut dibuat untuk mereka dan hanya berlaku kepada mereka. Demikian timbulah sikap etnosentrisme yang etnis Batak Angkola baik yang di Sipirok, para tetua yang tinggal di wilayah pedesaan mulai menghubungi sanak saudara, anak dan kerabat di luar daerah untuk ikut serta dalam mengembangkan gerakan pembangunan desa Marsipature Hutanabe. Perasaan yang dimiliki para individu etnis Batak Angkola di luar daerah Sipirok tentu sama dengan para tetua yang masih tinggal di desa, karena mereka sama-sama mempunyai rasa akan sejarah yang sama dari daerah yang sama.

Perlahan, gerakan tersebut mulai meraih perhatian dari para perantau di luar daerah untuk kembali membangun kampung halaman masing-masing. Dari sikap etnosentrisme tersebut dituai dampak positif, dimana mendorong niat para perantau untuk membantu melaksanakan pembangunan desa di kampung halamannya, yang meski sudah tidak ditinggali lagi tetapi dirinya dan masyarakat atau para tetua di kampung halaman dapat merasakan dorongan dan semangat untuk membangun desa karena memiliki latar belakang sejarah yang sama. Gerakan Marsipature Hutanabe juga menjadi penyalur bagi masyarakat etnis Batak Angkola yang telah menjadi perantau atau bahkan bermukim di luar daerah aslinya bahwa etnis atau suku bukanlah sebuah identitas yang hanya berlaku sebagai latar belakang seseorang. Tetapi etnis itu hidup dan mempunyai ajaran yang bermakna serta dapat diandalkan

sebagai salah satu cara untuk menjalani kehidupan. Melalui gerakan tersebut budaya Batak Angkola dapat menjaga keaslian dan keutuhan budayanya.

Dampak positif terakhir ialah meningkatkan semangat dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta mengembangkan perilaku semangat patriotisme dalam pembangunan desa yang tidak hanya berdampak pada kelompok etnis Batak Angkola Sipirok tetapi pada etnis-ethnis lainnya di Sumatra Utara untuk mengerahkan para perantau untuk kembali membangun kampung halaman masingmasing.

Etnosentrisme Batak Angkola telah mempertahankan Gerakan Marsipature Hutanabe sebagai sebuah gerakan pembangunan desa yang layak untuk diadopsi sebagai gerakan pembangunan desa nasional. Demikian ditahun-tahun selanjutnya, gerakan tersebut tidak hanya diterima dan dimiliki oleh etnis Batak Angkola Sipirok tetapi telah diterima oleh etnis-ethnis lainnya di wilayah Sumatra utara, seperti etnis Melayu, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pak-pak dan lain sebagainya. Terdapat musyawarah daerah Lembaga Sisingamangaraja XII Sumatra Utara pada tanggal 9 sampai 11 Juni 1989 di Pematang Siantar yang membawa hasil positif terhadap gagasan Marsipature Hutanabe. Dukungan didapat pula dari ibukota Indonesia, yaitu kota Jakarta tempat kebanyakan para perantau tinggal. Diseleggarakan Panel Diskusi "Pengembangan Potensi Wilayah Tapanuli Selatan dalam rangka Meningkatkan Pembangunan Kampung Halaman" pada tanggal 29 Oktober 1998 di Gedung LPPI Jalan Kemang Raya Jakarta.

Pada 29 September 1989 Gubernur Raja Inal Siregar bertemu ramah dengan masyarakat etnis Melayu Panai di Labuhan Bilik. Pada 21 November 1989 diadakan pula pertemuan dengan masyarakat Melayu Langkat dengan perantauan yang berhimpun di desa Tapak Kuda. Pertemuan selanjutnya di tanggal 24 Desember 1989 dengan masyarakat Melayu Asahan dan Batubara di Desa Silau Laut Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. Hasil dari pengenalan tersebut, masyarakat Melayu Sumatra Utara memandang Marsipature Hutanabe sebagai upaya menghadapi masalah pembangunan desa. Salah satu pencapaian gerakan tersebut di wilayah dengan etnis selain Batak Angkola ialah pencanangan Bulan Bhakti LKMD tanggal 1 Maret 1994 di Desa Cinta Rakyat Deli.

Pengaruh Marsipature Hutanabe dalam Dinas Perencanaan Pembangunan Desa di Sumatera Utara

Pada tahun 1989 merupakan masa pertengahan Orde Baru yang ditandai dengan proses pembangunan daerah di seluruh wilayah Negara Indonesia tak terkecuali wilayah Provinsi Sumatera Utara, demikian pada tahun 1963 dibentuk Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bakopasu) yang merupakan lembaga yang pertama kali bertugas dalam mengkoordinir perencanaan pembangunan di daerah Sumatera Utara, adapun lembaga tersebut diketuai oleh IR. M. Sipahutar dan Netap Bukit sebagai sekretarisnya. Bakopasu kini lebih dikenal dengan sebutan baru yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Provinsi Sumatera Utara yang merupakan sebuah instansi pemerintah yang berfungsi mengkoordinir pembangunan di daerah Sumatera Utara.

Bakopasu telah menjalankan perencanaan pembangunan desa di daerah Sumatera Utara namun sering kali mendapat kendala terkait ketertinggalan wilayah Pantai Barat dan Timur dimana penangan pengangguran dan kemiskinan serta penyediaan sarana dan prasarana khususnya di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan sangat minim hingga dijadikan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah di Sumatera Utara. Dalam sejarahnya, sebelum gagasan Marsipature Hutanabe digagaskan, pembangunan desa sudah lama menjadi prioritas utama pemerintah Sumatera Utara namun hal tersebut tidak berjalan secara kondusif akibat kurangnya perhatian masyarakat.

Demikian terobosan Gerakan Marsipature Hutanabe merupakan gerakan yang mengabulkan cita-cita Bakopasu dalam pembangunan desa, sebab dalam kasus ini Marsipature Hutanabe telah menjadi motivasi bagi pemerintah dan masyarakat baik di tanah perantauan atau di desa untuk bekerja sama melakukan upaya dalam peran masing-masing demi mensejahterakan masyarakat lewat pembangunan desa yang amat diperlukan pada masa tersebut.

Semangat pembangunan desa yang dikobarkan oleh Marsipature Hutanabe dalam pembangunan desa telah menarik perhatian Presiden Soeharto dan mengajak wilayah provinsi lainnya untuk mencontoh gerakan ini sehingga dapat mengupayakan pembangunan desa lebih giat lagi. hal tersebut diutarakan presiden Suharto dalam acara pencanangan Bulan Bhakti LKMD tanggal 1 Maret 1994 di Desa Cinta Rakyat Deli Serdang, ucapan presiden Suharto pada acara tersebut "Gerakan Marsipature Hutanabe di Sumatera Utara, misalnya telah menunjukkan hasil. Gerakan ini perlu terus digalakkan. Gerakan-gerakan pembangunan pedesaan seperti ini merupakan salah satu wujud dari peran serta masyarakat untuk menunjang program pemerataan" sebagai mana dikutip dari buku Gubernur Sumatera dan para Gubernur Sumatera Utara oleh Muhammad Tok Wan Haria.

Gerakan Marsipature Hutanabe yang diawali dengan eksentrisme dapat membawa dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat di Sumatera Utara yang bersifat heterogen ini merupakan bagian dari teori fungsional yang dikemukakan Emile Durkheim dalam ilmu sosial. Menurut Durkheim masyarakat merupakan entitas manusia dengan organ-organ yang berbeda diantaranya terdapat agama, pendidikan, politik, peradilan, dan sebagainya yang saling bergantung satu sama lain. Jika salah satu dari organ tersebut rusak atau gagal melaksanakan tugasnya maka seluruh organisme akan mengalami kegagalan. Demikian Durkheim menggunakan teori fungsional sebagai gagasan yang menggambarkan pentingnya kerja sama dalam sebuah masyarakat sosial. Fungsionalisme mengacu pada tujuan yang diusung masyarakat demi kesejahteraan kehidupan mereka, demikian teori tersebut merupakan sebutan yang tepat untuk kasus Gerakan Marsipature Hutanabe yang memaksimalkan kerja sama antar pemerintahan pusat dengan masyarakat dengan menjalankan fungsi masing-masing, diantaranya pemerintah pusat berfungsi

sebagai penggagas dan penyelenggara, perantau di kota besar sebagai penggerak dan penyedia, pemerintah desa sebagai eksekutor pembangunan, demikian pemerintah dan masyarakat bersatu dalam mengusung tujuan pembangunan desa yang menjadi kebutuhan utama serta sebuah langkah demi mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Etnosentrisme merupakan sikap yang rentan memberi dampak negatif terhadap lingkungannya, hal tersebut telah banyak terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia. Dimana dampak tersebut dapat berasal dari kekejaman penjajah, pemberontakan, atau konflik antar dua etnis. Namun dalam sejarah Indonesia, salah satunya di Provinsi Sumatra Utara terdapat peristiwa sosial dimana etnosentrisme memberi dampak positif terhadap lingkungannya, yaitu etnosentrisme Batak Angkola Sipirok dalam Gerakan Pembangunan Desa Marsipature Hutanabe. Adapun dampak positifnya ialah dimana mendorong para perantau dan menguatkan masyarakat yang memiliki latar belakang sejarah yang sama, meningkatkan semangat dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta mengembangkan perilaku semangat patriotisme dalam pembangunan desa yang tidak hanya berdampak pada kelompok etnis Batak Angkola Sipirok tetapi pada etnis-etnis lainnya di Sumatra Utara untuk mengerahkan para perantau untuk kembali membangun kampung halaman masing-masing. Gerakan Marsipature Hutanabe merupakan praktek sosial dari teori fungsionalisme pemerintah dan masyarakat bersatu dalam mengusung tujuan pembangunan desa yang menjadi kebutuhan utama serta sebuah langkah demi mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, Malik Huma & Malik, Fizana Ashraf. (2022). Emile Durkheim Contributions to Sociology. *IJAMR: International Journal of Academic Multidisciplinary Research*, 6(2), 7-10.
- Amri, Yusni Khairul. & Syahputri, Diani. (2021). Bittot Van De Longas' Indiscriminate as a Message of Angkola Culture, *BIRCI-Journal: Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(4), 10539-10546.
- Andaya, Barbara Watson. (1995). Upstreams and Downstreams in Early Modern Sumatra. *The Historian*, 57(3), 537-552.
- ariss, Leonard Y. (2002). The Trans-Sumatra Trade and the Ethnicization of the 'Batak'. *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde: Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 158(3), 367-409.
- Ariss, Robert Mcleod. (1969). *A Critique of the Concept Ethnocentrism as Set Forth in Selected Social Science Literature* (Publication No. 7005197) [Doctoral dissertation, University of Southern California]. ProQuest Dissertations Publishing.

- Bappelitbang. (2023). Sejarah-bappelitbang.sumutprov.go.id. Sumutprov.go.id. Bappelitbang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Bizumic, Boris. Monaghan, Conal. & Priest, Daniel. (2021). The Return of Ethnocentrism. *Political Psychology*, 42(1), 29-73.
- Bruner, Edward M. (1961). Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra. *JSTOR: American Anthropologist*, 63(3), 508-521.
- Bruner, Edward M. (1999). Return to Sumatra: 1957, 1997. *American Anthropological Association; American Ethnologist*, 26(2), 461-477.
- Gottschalk, Louis. (1995). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-Press.
- Haria, Muhammad Tok Wan. 2006. *Gubernur Sumatera dan Para Gubernur Sumatera Utara*. Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Hoshour, Cathy A. (1997). Resettlement and the Politicization of Ethnicity in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde: Riau in Transition*, 153(4), 557-576.
- Jakarta: Kencana.
- Jr, William R. Catton. & Hong, Sung Chick. (1962). The Relation of Apparent Minority Ethnocentrism to Majority Antipathy, *JSTOR: American Sosiological Review*, 27(2), 178-191.
- Kipp, Rita Smith. (1993). *Dissociated Identities: Ethnicity, Religion, and Class in an Indonesian Society*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengertian Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Majid, M Dien. & Wahyudi, Johan. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*.
- Muda, Indra. & Sharyanto, Agung. (2020). Analysis of life's inter-religious harmony based on the philosophy of Dalihan Na Tolu in Sipirok Sub-district, South Tapanuli Regency, North Sumatera Province. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 30(5), 533-540.
- Rahman, Mohammad Taufiq. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.
- Reid, Anthony. (1987). *The Identity of "Sumatra" in History*. Canberra: Australian National University Research Publications.
- Rodgers, Susan. (2012). How i Learned Batak: Studying the Angkola Batak Language in 1970s New Order Indonesia. *JSTOR: Indoneisa*, 9(3), 1-32.
- Siregar, Raja Inal. (1990). *Marsipature Hutanabe*. Medan: Harian Analisa.
- Stoler, Ann Laura. (1988). Working the Revolution: Plantation Laborers and the People's Militia in North Sumatra. *The Journal of Asian Studies*, 47(2), 227-247.
- Sumner, William Graham. (2007). *Folkways: A Study of Mores, Manners, Customs and Morals*. New York: Cosimo Classics.
- Thomas, Karen Kartomi. (2015). Masks of Sumatra. *Asian Theatre Journal*, 32(2), 575-597.